

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan kesatuan Bangsa dan Politik. Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

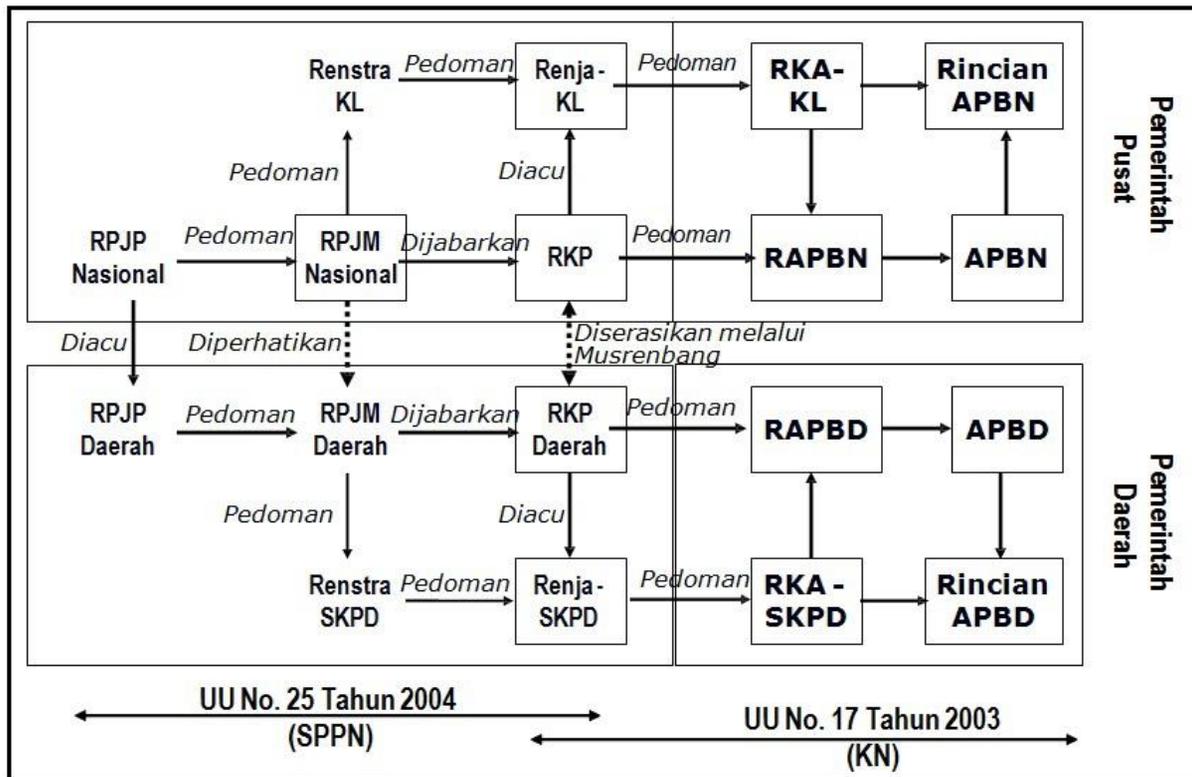
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); → **khusus ditambahkan untuk Perangkat Daerah yang mengampu Kegiatan Dais 2023**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - g. **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;**
  - h. Peraturan Menteri ....\*\*) Nomor ....\*\*) Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian ....\*\*) Tahun 2023; *(agar diisikan dengan nama Kementerian yang terkait)*
  - i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85); → **khusus ditambahkan untuk Perangkat Daerah yang mengampu Kegiatan Dais 2023**
  - j. **Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;**
  - k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor .....\*) Tahun ....\*) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja .....\*) Kabupaten Bantul; dan (agar diisikan sesuai nomor perbup tupoksi Perangkat Daerah yang bersangkutan);
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor .... );
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan RKA Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan kesatuan

Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II.**  
**HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN**  
**2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Baadan Kesatuan bangsa dan Politik

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>LAKIP</b>	<b>85</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	<b>11</b>	11	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	evaluasi renja, LKJ, LKPD, LPPD, AKIP, Renstra, Renja, RK A, DPA, CALK, lap. Barang	11	11	100%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Capaian administrasi Keuangan	<b>14b &amp; 12</b>	<b>14 &amp; 12</b>	79%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	14	14	0%
	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	12	12	0%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Pengelolaan administrasi Umum</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>65%</b>

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komp. Instalasi Listrik	3	3	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat & Bahan pembersih, ATK, Bendera, Papan Nama	49	49	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan, Spanduk dan penggandaan	9 57397	9 57397	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan	24	24	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Cinderamata Tanaman Hias	8 10	8 10	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi Kunjungan Tamu	28	28	100%
		SPPD dalam Daerah dan Luar Daerah	311	311	<b>100%</b>
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	100	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor	8	8	<b>100%</b>

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100</b>	100	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai	0	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Rek Telepon	12	12	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keu dan Non ASN	144	147	<b>100%</b>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM, isi freon, servis Kend. Dinas dan Suku cadang	10	10	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak STNK	10	10	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis AC, Freon dan Servis Computer	14	14	100%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	14	14	100 %
	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	100	<b>100</b>	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	#REF!	12	12	100%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Lomba Upacara Laporan Kajian Pemantapan Wawasan Kebangsaan	12	12	100%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Pemilih yang berpartisipasi</b>	75	81 %	103%

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	75	81 %	103%
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Bimtek dan Verifikasi Parpol dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos	15	15	100%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM</b>	<b>76</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM	76	81	100%

	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	FGD ormas,orsos dan LSM, Lap. Mediasi sengketa ormas Lap. Pendaftaran Ormas Laporan Rakor Ormas,Orsos dan LSM	28	28	100%
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		<b>Persentase FKUB Aktif</b>	<b>100</b>	100	160%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase FKUB Aktif	100	100	160%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Lap. Dialog & Raker FKUB Lap. FGD & Raker FPK Lap. Konseling pelajar dan Penertiban Pelajar , Lap. Usulan Verifikasi Rekomendasi IMB Tempat Inbadah Raker P4GN dan Sosilaisasi Narkoba	49	49	100%

	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase FKDM tingkat Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase FKDM tingkat Kecamatan	100	100	179%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Lap. FGD & Rapat Kominda Lap FGD & Rapat Penanganan Konflik sosial Lap. FGD dan Rapat POA Laaaap. FGD dan pemberdayaan Kel, Masy. Lap. pelatihan FKDM Lap. pemantauan pembinaan Satuan Keamnan. Lap. pemberdayaan Perangkat Desa.	49	49	100%
	Pembinaan Jaga Warga ( Danais)	Terbentuknya Kelompok Jaga Warga	100	100	100
	Pembinaan Jaga Warga ( Danais)		17	17	100 %

--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang  
Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program	.....
	Kegiatan .....	.....
	Sub Kegiatan .....	.....
	dst.	
2.	Program .....	.....
	Kegiatan .....	.....
	Sub Kegiatan .....	.....
	dst.	

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang  
Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesadaran Masyarakat, Dukungan Akademisi, Semangat Nasionalisme, Komitmen Tokoh-tokoh Masyarakat .

	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	
2.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Sinergitas dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Dukungan Legislatif, Dukungan Akademi.
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Koordinasi dengan Instansi Terkait
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	

	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Adanya Perbup No 11 Tahun 2021 Tentang : P4GN dan Prekursor Narkotika, Dukungan Tokoh Agama yang aktif,
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	.Pemantapan Hubungan Lintas Organik Intelijen.
	Adat seni,tradis dan ,Budaya	
	Pembinaan Jaga Warga ( Danais)	Adanya Pergub 28 tahun 2021

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja

Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Badan kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Badan kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan kesatuan Bangsa dan Politik

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
1.	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu legislative dan Pilpres	-	-	-	87,89 %	-	75 %	80,32 %	
2.	Jumlah Intoleransi di Masyarakat	0	0	0	2	0	0	0	

Keterangan:

\*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan kesatuan Bangsa dan Politik yang tidak memenuhi target adalah:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. ....
  - b. ....
  - c. dst
2. IKU Badan kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat memenuhi target adalah:
    1. Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu legislative dan Pilpres.
    2. Jumlah Intoleransi di Masyarakat

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya Koordinasi dan kerjasama yang baik antar Instansi Terkait dalam Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama
- b. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.
- c. Terlaksananya Pembinaan Pemilih Pemula.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Urusan Pemerintahan Umum <sup>\*\*</sup>*(diisikan sesuai urusan yang diampu)*. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

## Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
1. Terkoordinasikannya semua stakeholder selaku pemangku kepentingan.	1. Masih adanya fanatisme yang berlebihan /fanatik sempit
2. Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga agama lainnya	2. Masih banyak generasi muda /pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja
3. Adanya sumberdaya manusia dan Tersediannya anggaran.	3. Sumberdaya manusia belum yang ada belum memadai baik kualitas dan kuantitas
4. Semangat yang tinggi dan motifasi dari Pimpinan Bakesbangpol	4. Belum sepenuhnya dapat terdani dengan anggaran Bakesbangpol yang masih Minim

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

## Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Keterbukaan Informasi Publik	Tuntutan Adanya Informasi Pelayanan secara transparan
Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.	Terjadinya Indikasi Politik Uang. Menjaga Stabilitas di daerah.
Stabilitas keamanan lingkungan di masyarakat cukup kondusif	Adanya Potensi Konflik berbasis SARA
Semakin Tinggi Pendidikan Masyarakat	Adanya Perubahan masyarakat dalam kebudayaan dan pemikiran yang dinamis.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dst.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Badan kesatuan Bangsa dan

Politik Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Bantul	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	86	3.560.387.565	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Bantul	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	86	3.560.387.565	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	30.000.000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	30.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Renstra, Proses Bisnis, Renja,RKA,	4 dok	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Renstra, Proses Bisnis, Renja,RKA,	4 dok	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		LAKIP	1 dok	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		LAKIP	1 dok	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Ikhtisar Realisasi Kinerja					Ikhtisar Realisasi Kinerja					
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja</b>	<b>100</b>	<b>2.806.650.555</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja</b>	<b>100</b>	<b>2.806.650.555</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	238 orang/bulan	2.448.204.406,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	238 orang/bulan	2.448.204.406,-	
	Penyediaan Administrasi Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Tugas ASN	120 Dokumen	105.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Tugas ASN	120	105.000.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 laporan	49.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 laporan	49.900.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>191.699.291,-</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>210.945.010,-</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 paket	2.669.291	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 paket	2.669.291	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	23.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	23.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi skpd	20 Dok 350 dok . 90 dok	146.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi skpd	20 Dok 350 dok . 90 dok	162.945.010	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>80.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>400.000.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 unit	69.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	350.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka	4 unit	11.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka	4 unit	50.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>85</b>	<b>160.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>85</b>	<b>160.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Meterai yang disediakan	30 lembar	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 lembar	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 orang/bulan	48.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 orang/bulan	48.200.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>292.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>292.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		Kendaraan Dinas & Operasional & pajak Kendaraan dinas	14	194.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		Kendaraan Dinas & Operasional & pajak Kendaraan dinas	14	194.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pajak kendaraan Dinas	14	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pajak kendaraan Dinas	14	15.000.000	
	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan mebel	34	7.500.000	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan mebel	34	7.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	22	17.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	22	17.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan /Rehab	1	65.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan /Rehab	1	200.000.000	
	<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		<b>Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>391.000.000</b>	<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		<b>Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>391.000.000</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang</b>		<b>Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>391.000.000</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang</b>		<b>Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>391.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>					<b>Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Upacara hari Besar Nasional, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Laporan hasil Pemantapan Wawasan Kebangsaan	11	391.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Upacara hari Besar Nasional, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Laporan hasil Pemantapan Wawasan Kebangsaan	11	391.000.000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>		Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	84 persen	2.849.967.990	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>		Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	84 persen	2.849.967.990	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan		Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	84 Persen	2.849.967.990	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan		Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	84 Persen	2.849.967.990	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>					<b>Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>					
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Laporan hasil : Bimtek dan verifikasi Parpol, Dialog Politik, Sosialisasi & TOT pemilos,	5	2.849.967.990	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan		Laporan hasil : Bimtek dan verifikasi Parpol, Dialog Politik, Sosialisasi & TOT pemilos,	5	2.849.967.990	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Situasi Politik Di Daerah					
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>Cakupan Pembinaan Ormas</b>	<b>23 Persen</b>	<b>126.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>Cakupan Pembinaan Ormas</b>	<b>23 Persen</b>	<b>126.000.000</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Cakupan Pembinaan Ormas	23 Persen	126.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Cakupan Pembinaan Ormas	23 Persen	126.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Laporan hasil rapat koordinasi,Laporan Pendaftaran , Ormas,Orsos dan LSM dan laporan hasil Pemantauan Ormasy	4 dokumen	126.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Laporan hasil rapat koordinasi,Laporan Pendaftaran , Ormas,Orsos dan LSM dan laporan hasil Pemantauan Ormasy	4 dokumen	126.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN</b>		<b>Kerukunan Antar Umat Beragama</b>	<b>100 persen</b>	<b>400.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN</b>		<b>Kerukunan Antar Umat Beragama</b>	<b>100 persen</b>	<b>400.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>					<b>EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>					
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		<b>FKUB Aktif</b>	<b>100 Persen</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		<b>FKUB Aktif</b>	<b>100 Persen</b>	<b>400.000.000</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Laporan Hasil Kegiatan Dialog & Raker FKUB, FPK, P4GN, Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB tempat Ibadah, Sosialisasi Narkoba, Konseling pelajar & Penertiban Pelajar	6	400.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Laporan Hasil Kegiatan Dialog & Raker FKUB, FPK, P4GN, Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB tempat Ibadah, Sosialisasi Narkoba, Konseling pelajar & Penertiban Pelajar	6	400.000.000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		<b>Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD</b>	<b>1</b>	<b>447.267.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		<b>Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD</b>	<b>1</b>	<b>447.267.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD</b>	<b>100</b>	<b>447.267.000</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD</b>	<b>100</b>	<b>447.267.000</b>	
	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing. Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.		Notifikasi Pengkondisian Masyarakat Yang diminta OPD	3	170.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing. Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.		Notifikasi Pengkondisian Masyarakat Yang diminta OPD	3	170.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga		Laoran Hasil Koordinasi FKD, FKDM dan Penanganan Konflik di daerah	9	222.267.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja		Laoran Hasil Koordinasi FKD, FKDM dan Penanganan Konflik di daerah	9	222.267.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>		<b>Cakupan lokasi yang prakondisi</b>	<b>16,67%</b>	<b>417.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>		<b>Cakupan lokasi yang prakondisi</b>	<b>16,67%</b>	<b>417.000.000</b>	
	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)</b>		<b>Lokasi yang diprakondisi</b>	<b>16,67%</b>	<b>417.000.000</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)</b>		<b>Lokasi yang diprakondisi</b>	<b>16,67%</b>	<b>417.000.000</b>	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)		Kader Pembauran	<b>16,67%</b>	<b>417.000.000</b>	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)		Kader Pembauran	<b>16,67%</b>	<b>417.000.000</b>	
					<b>8.191.622.555</b>					<b>8.396.622.555</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat  
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan kesatuan Bangsa dan Politik.....\*) *(diusikan sesuai nama Perangkat Daerah yang bersangkutan)*

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dlingo dan Sewon	Penyuluhan bahaya narkoba bagi remaja	3	

→ narasi bagi OPD yang memiliki usulan masyarakat pada musrenbang kecamatan atau usulan para pemangku kepentingan

Berdasarkan Permendagri No; 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Dalam rangka meningkatkan kesadaran Masyarakat Kabupaten Bantul akan bahaya Narkotika bagi anak maupun remaja di masyarakat sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan ,untuk itu kegiatan ini sangat penting untuk di laksanakan guna mencegah meningkatnya pengguna narkoba bagi Remaja maupun anak-anak.

*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pemegang peran bdalam pemberantasan narkoba di masyarakat mempunyai tugas pokok untuk memberikan sosialisasi maupun penyuluhan pencegahan bahaya Narkotika ini guna mensukseskan Bantul Bebas Narkoba tahun 2025.*

*Besar Dukungan dari masyarakat terutama pemerintah desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja menjadi tanggung jawab kita bersama*

## **BAB III.**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ***"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*** dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga stabilitas sosial politik bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
2. Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Budaya untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme.
3. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama.
4. Penguatan Nilai-nilai Demokrasi.
5. Meningkatkan peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah "Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas". Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan kesatuan Bangsa dan Politik serta tujuan dan sasaran Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

#### Tujuan dan Sasaran Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penanganan gangguan trantibumlinmas yg di tangani di bagi pengaduan trantibumLINMAS yg di selesaikan di kali 100 persen	100 %
	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkukada		77 %
	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Jumlah intoleransi di masyarakat	Jumlah kasus intoleransi di masyarakat	0

		Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Wilayah yang Dikondisikan	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0
--	--	---	---	---

#### BAB IV.

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan kesatuan Bangsa dan Politik

*Tabel disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD*

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
					Capaian Program			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Keluaran	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						247.000.000			



8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.373.638.897	
8	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								27.925.000	
8	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaa n,pengangg aran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	86 Angk a	4 Dokume n	100 pers en	8.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
8	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Capaian kinerja perencanaa n,pengangg aran dan	Kab. Bantul, Semua Kecamata	86 Angk a	3 Dokume n	100 pers en	10.575.000	Dana Transfer Umum- Dana

						Pemerintah (AKIP)	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	evaluasi kinerja perangkat daerah	n, Semua Kelurahan					Alokasi Umum
8	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian kinerja perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	1 Laporan	100 persen	8.950.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

8	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.551.464.406	
8	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	86 Angk a	238 Orang /bulan	100 pers en	2.448.204.406	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
8	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	86 Angk a	120 Doku men	100 pers en	77.760.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
8	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	86 Angk a	22 Lapora n	100 pers en	25.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

							Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD							
8	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								301.134.000	
8	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	86 Angk a	1 Paket	100 pers en	2.694.980	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
8	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	86 Angk a	4 Paket	100 pers en	22.710.040	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

								Perangkat Daerah						
8	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	6 Paket	100 persen	20.004.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	350 Laporan	100 persen	255.724.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								124.947.000	
8	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas	Jumlah Unit Peralatan	Capaian kinerja	Kab. Bantul,	86 Angka	4 Unit	100 persen	124.947.000	Dana Transfer

					Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dan Mesin Lainnya yang Disediakan	pengelolaan administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53.968.200	
8	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	30 Laporan	85 persen	300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	12 Laporan	85 persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

							Listrik yang Disediakan							
8	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	24 Laporan	85 persen	47.668.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								314.200.291	
8	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	15 Unit	100 persen	212.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

							dibayarkan Pajaknya							
8	1	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	10 Unit	100 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	20 Unit	100 persen	12.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	1 Unit	100 persen	84.590.291	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								589.216.250	
8	1	2	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								589.216.250	
8	1	2	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Pers en	500 Orang	100 pers en	589.216.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum



					Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
8	1	3	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	1500 Orang	84 persen	2.789.071.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum





					PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
8	1	5	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								697.345.000	
8	1	5	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kerukunan Antar Umat Beragama	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	FKUB Aktif	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1250 Orang	100 Persen	697.345.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



					Penanganan Konflik Sosial									
8	1	6	02.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh OPD	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Persentase Bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	48.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

							Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun							
8	1	6	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Persentase Bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	250 Orang	100 Persen	246.584.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



## **BAB V.**

### **PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA

Stephanus Heru Wismantara, SIP.MM.

NIP. 196512261986021001